



PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN, TATA CARA PENGGUNAAN,  
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BATAS JUMLAH  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN  
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, dalam pelaksanaan belanja langsung/belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2015 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN, TATA CARA PENGGUNAAN, PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN-UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN-GANTI UANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokemen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II  
PENETAPAN PENGGUNAAN BATAS JUMLAH DAN MEKANISME SPP-UP DAN  
SPP-GU

Pasal 2

Pencairan dana kepada pengguna anggaran didasarkan pada surat penyediaan dana yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD menerbitkan SPM-UP berdasarkan DPA-SKPD atas permintaan bendahara pengeluaran.
- (2) Berdasarkan SPM-UP dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara pengeluaran yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.
- (5) Bagi bendahara pengeluaran yang dibantu oleh beberapa bendahara pengeluaran pembantu, dalam pengajuan SPP-UP diwajibkan melampirkan daftar Rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing bendahara pengeluaran pembantu.
- (6) Besarnya Dana SPP-UP ditetapkan sebesar maksimal 1 / 12 (Satu Per Dua Belas) dari total anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan pembayaran langsung yang diterima oleh pihak ketiga dari anggaran SKPD.

Pasal 4

- (1) UP dapat diberikan dalam batas-batas belanja sebagai berikut :
  - a. Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau pemerintah kerja.
  - b. Uang Persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS.
  - c. Pengecualian dari huruf (a) dan huruf (b) diatur oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran UP setiap SKPD dapat dilihat pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengisian kembali UP sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan apabila dana UP telah digunakan sekurang-kurangnya 70% dari dana UP yang diterima.

- (2) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 70%, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana UP yang tersedia, Kepala SKPD dimaksud dapat mengajukan TU.
- (3) PPKD dapat memberikan TU sampai dengan jumlah Rp.200.000.000,- dan penambahan TU diatas Rp. 200.000.000,- harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

Jumlah batasan Pengajuan SPP-UP untuk masing- masing rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a maksimal Rp.25.000.000,-

#### Pasal 7

Jumlah batasan Pengajuan SPP-UP untuk belanja perjalanan dinas dan kontribusi pelatihan dalam rangka pengembangan SDM berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan ini.

#### Pasal 8

Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan diatur sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak / tidak dapat ditunda.
- b. Digunakan paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
- c. Apabila tidak habis digunakan dalam 1 bulan sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran, harus disetor ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- d. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf (c) sisa TU belum disetorkan ke rekening kas umum daerah, maka permintaan GU tidak dapat diterbitkan SP2D nya.

#### Pasal 9

Dalam pengajuan permintaan TU bendahara pengeluaran wajib menyampaikan :

- a. Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta sisa dana rekening yang diminta TU;
- b. Rekening Koran yang menunjukkan saldo akhir dan;
- c. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan / dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

#### Pasal 10

Penggantinan UP, diajukan ke PPKD dengan SPM-GU, dilampiri surat pernyataan tanggungjawab (SPTB), dan foto copy surat setoran pajak (SSP) yang dilegalis oleh Kepala SKPD untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh.

#### Pasal 11

Penggunaan atas Tambah Uang Persediaan diajukan oleh bendahara pengeluaran dengan SPP-GU nihil yang berisi SPJ dari nilai tambah uang yang diajukan kemudian Pengguna Anggaran / Kuasa PA menerbitkan dan mengajukan SPM-GU nihil ke BUD dan selanjutnya BUD menerbitkan SP2D-GU Nihil.

## Pasal 12

Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 9 huruf (a) yaitu :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Sifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
  - Penanggulangan bencana alam.
  - Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap terganggunya stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan terhadap realisasi dana dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku tentang Tambahan Uang Persediaan.

## Pasal 13

- (1) Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU Nihil dan diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D-GU Nihil.
- (2) Bila ada kelebihan atau penggunaan UP di SKPD bendahara pengeluaran wajib menyetor kelebihan tersebut ke rekening kas umum daerah sebelum 31 Desember tahun berkenaan.
- (3) Setoran sisa UP dimaksud, dibukukan oleh PPKD sebagai pengembalian UP sesuai rekening yang ditetapkan.

## Pasal 14

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetorkan ke rekening kas umum daerah.

## Pasal 15

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp.25.000.000,- kecuali untuk pembayaran honor.

## BAB III PEMBUKUAN SPP-UP DAN SPP-GU

## Pasal 16

- (1) Pembukuan Belanja oleh Bendahara menggunakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan :
  - a. SP2D UP dan SP2D GU
  - b. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
  - c. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
- (2) Pembukuan Penerimaan SP2D-UP / SP2D-GU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP / SP2D GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait.

- (3) Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persediaan dengan 2 (dua) cara yaitu :
- a. Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar.
  - b. Pembukuan belanja melalui uang panjar.

**BAB IV**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SPP-UP DAN SPP-GU**

**Pasal 17**

Bendahara wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban terdiri atas :

- a. Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan.
- b. Pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang.
- c. Pertanggungjawaban administratif.
- d. Pertanggungjawaban fungsional

**BAB V**  
**PENUTUP**

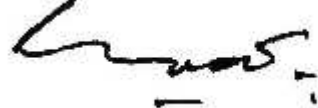
**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 5 Januari 2015

**BUPATI BARITO KUALA,**



**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
Pada Tanggal 5 Januari 2015  
**SEKRETARS DAERAH ,**

  
**H. SUPRIYONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 1.

Nomor registrasi 1.2015.001





TAMBAH UANG (TU)  
SKPD SE KABUPATEN BARITO KUALA TA. 2012

NO	SKPD	TAMBAH UANG	GU NIHIL	SALDO	SETORAN
1	Dinas Pendidikan	4,106,543,000	4,106,543,000	-	
2	Dinas Pendidikan	4,134,129,250	4,134,129,250	-	
3	Dinas Pendidikan	4,134,129,250	4,125,100,250	9,029,000	9,029,000
4	Dinas Pertanian	138,000,000	138,000,000	-	
5	Kesbangpollinmas	39,000,000	39,000,000	-	
6	Kesbangpollinmas	28,479,500	27,249,500	1,230,000	1,230,000
7	Kesbangpollinmas	18,300,000	18,300,000	-	
8	Kesbangpollinmas	20,000,000	20,000,000	-	
9	Kesbangpollinmas	44,650,000	44,650,000	-	
10	Kesbangpollinmas	18,881,000	18,881,000	-	
11	Kesbangpollinmas	30,830,000	30,830,000	-	
		12,712,942,000	12,702,683,000	10,259,000	10,259,000

Marabahan, 30 Desember 2011  
Kuasa BUD

DRS.H.SAMSON,M.Si  
Nip.196805021990031011

GANTI UANG PERSEDIAN NIHIL  
SKPD SE KABUPATEN BARITO KUALA TA. 2012

NO	SKPD	UANG PERSEDIAN	GU NIHIL	SALDO	SETORAN
1	DIKNAS/Sekretariat	400,000,000	245,074,075	154,925,925	154,925,925
2	DIKNAS/Dikmen	101,000,000	101,000,000	-	-
3	DIKNAS/PMPTK	90,000,000	52,607,230	37,392,770	37,392,770
4	DIKNAS/DIKDAS	87,000,000	69,865,000	17,135,000	17,135,000
5	DIKNAS/PNFI	97,000,000	84,275,000	12,725,000	12,725,000
6	DINAS KES/SEKRETARIAT	199,000,000	178,521,040	20,478,960	20,478,960
7	PELAYANA KESEHATAN	223,000,000	191,450,180	31,549,820	31,549,820
8	P2PL	63,000,000	51,642,500	11,357,500	11,357,500
9	Binkesga	108,000,000	105,076,700	2,923,300	2,923,300
10	PROMKES	84,000,000	32,962,900	51,037,100	51,037,100
11	RSUD ABD AZIS	170,000,000	84,062,957	85,937,043	85,937,043
12	PU/ SEKRETARIAT	60,000,000	59,937,860	62,140	62,140
13	BINA MARGA	50,000,000	40,508,700	9,491,300	9,491,300
14	CIPTA KARYA	70,000,000	45,464,000	24,536,000	24,536,000
15	SUMBER DAYA AIR	73,000,000	72,943,000	57,000	57,000
16	PU/Kebersihan	127,000,000	122,443,500	4,556,500	4,556,500
17	JASA KONSTRUKSI	44,000,000	44,000,000	-	-
18	BAPEDA	154,000,000	153,953,925	46,075	46,075
19	DISHUBKOM	75,000,000	74,978,764	21,236	21,236
20	BADAN LH	97,000,000	70,127,915	26,872,085	26,872,085
21	DISDUK CAPIL	133,000,000	125,106,311	7,893,689	7,893,689
22	BKPP3A	86,000,000	85,813,886	186,114	186,114
23	DINSOSNAKERTRANS	153,000,000	64,136,000	88,864,000	88,864,000
24	BPBD	50,000,000	47,000,500	2,999,500	2,999,500
25	DISKOPPERINDAG	98,000,000	31,894,800	66,105,200	66,105,200
26	DISPORA BUD PAR	100,000,000	82,837,100	17,162,900	17,162,900
27	KESBANG LINMAS	250,000,000	249,999,377	623	623
28	KTR.SATPOL PP	200,000,000	75,403,913	124,596,087	124,596,087
29	SET. DPRD	415,000,000	343,433,800	71,566,200	71,566,200
30	DPPKKD	200,000,000	199,561,486	438,514	438,514
31	INSPEKTORAT	125,000,000	82,522,500	42,477,500	42,477,500
32	BKD	200,000,000	65,107,246	134,892,754	134,892,754
33	KTR PEL TERPADU	31,000,000	29,164,950	1,835,050	1,835,050
34	KETAHANAN PANGAN	126,000,000	124,869,500	1,130,500	1,130,500
35	BADAN PMPD	139,500,000	87,624,391	51,875,609	51,875,609
36	KTR. PERPUSDA	50,000,000	46,492,535	3,507,465	3,507,465
37	PERTANIAN DAN HOLT	163,000,000	162,996,500	3,500	3,500
38	DIS PETERNAKAN	85,000,000	84,998,814	1,186	1,186
39	DIS KEHUTANAN	87,000,000	34,227,493	52,772,507	52,772,507
40	DIS PERIKANAN	74,000,000	69,696,257	4,303,743	4,303,743
41	SEKRETARIAT DAERAH	700,000,000	699,818,210	181,790	181,790
42	KEC.TABUNGANEN	14,000,000	14,000,000	-	-
43	KEC.TAMBAN	15,000,000	8,583,000	6,417,000	6,417,000
44	KEC.MEKARSARI	15,000,000	15,000,000	-	-
45	KEC.ANJIR PASAR	10,000,000	10,000,000	-	-
46	KEC.AJR MUARA	10,000,000	7,050,000	2,950,000	2,950,000
47	KEC.ALALAK	34,000,000	12,056,650	21,943,350	21,943,350
48	KEC.MANDASTANA	15,000,000	15,000,000	-	-
49	KEC.BELAWANG	11,000,000	10,927,500	72,500	72,500
50	KEC.WANARAYA	17,000,000	17,000,000	-	-
51	KEC.BARAMBAI	15,000,000	15,000,000	-	-
52	KEC.RANTAU BADAUH	15,600,000	12,239,850	3,360,150	3,360,150
53	KEC.CERBON	13,500,000	13,461,500	38,500	38,500
54	KEC.BAKUMPAI	14,000,000	9,760,000	4,240,000	4,240,000
55	KEC.MARABAHAN	24,000,000	21,632,965	2,367,035	2,367,035
56	KEC.TABUKAN	10,000,000	7,860,500	2,139,500	2,139,500
57	KEC.KURIPAN	10,000,000	10,000,000	-	-
58	KEC.JEJANGKIT	13,000,000	13,000,000	-	-
	JUMLAH	6,093,600,000	4,886,172,780	1,207,427,220	1,207,427,220

Marabahan, 28 Desember 2012  
Kuasa BUD

DRS.H.SAMSON,M.Si  
Nip.196805021990031011



TAMBAH UANG (TU)  
SKPD SE KABUPATEN BARITO KUALA TA. 2012

NO	SKPD	TAMBAH UANG	TU NIHIL	SALDO	SETORAN
1	Kesbangpolinmas	483,684,000	483,684,000		
2	Kesbangpolinmas	99,900,000	99,900,000	-	
3	Kesbangpolinmas	808,579,000	808,579,000	-	
4	Kesbangpolinmas	92,644,000	92,644,000	-	
5	Kesbangpolinmas	167,884,950	167,868,000	16,950	16,950
6	Kesbangpolinmas	32,770,000	32,770,000	-	
7	DINAS Kesehatan	897,484,458	897,484,458	-	
8	DINAS Kesehatan	22,801,680	22,766,480	35,200	35,200
9	Sekretariat Daerah	48,322,000	48,322,000	-	
10	Sekretariat Daerah	34,875,000	34,875,000	-	
11	Sekretariat Daerah	36,880,000	36,880,000	-	
12	Sekretariat Daerah	154,416,000	154,416,000	-	
13	Sekretariat Daerah	22,500,000	22,500,000	-	
14	Sekretariat Daerah	12,000,000	12,000,000	-	
		2,914,741,088	2,914,688,938	52,150	52,150

Marabahan, 28 Desember 2012  
Kuasa BUD

DRS.H.SAMSON,M.Si  
Nip.196805021990031011

GANTI UANG PERSEDIAN NIHIL  
SKPD SE KABUPATEN BARITO KUALA TA. 2011

NO	SKPD	UANG PERSEDIAN	GU NIHIL	SALDO	SETORAN
1	DIKNAS/Sekretariat	404,000,000	332,932,608	71,067,392	71,067,392
2	DIKNAS/Dikmen	86,000,000	86,000,000	-	-
3	DIKNAS/PMPTK	84,000,000	62,533,000	21,467,000	21,467,000
4	DIKNAS/DIKDAS	80,000,000	72,980,500	7,019,500	7,019,500
5	DIKNAS/PNFI	92,000,000	91,406,000	594,000	594,000
6	DINAS KES/SEKRETARIAT	249,000,000	223,763,649	25,236,351	25,236,351
7	PELAYANA KESEHATAN	163,000,000	162,912,100	87,900	87,900
8	P2PL	103,000,000	102,924,000	76,000	76,000
9	PROMKES	121,000,000	61,158,700	59,841,300	59,841,300
10	RSUD ABD AZIS	190,000,000	86,188,400	103,811,600	103,811,600
11	PU/ SEKRETARIAT	50,000,000	50,000,000	-	-
12	BINA MARGA	69,000,000	69,000,000	-	-
13	CIPTA KARYA	81,000,000	81,000,000	-	-
14	PENGAIRAN	52,000,000	52,000,000	-	-
15	PU/Kebersihan	93,000,000	90,230,000	2,770,000	2,770,000
16	JASA KONSTRUKSI	30,000,000	11,067,000	18,933,000	18,933,000
17	BAPEDA	170,000,000	141,234,600	28,765,400	28,765,400
18	DISHUBKOM	50,000,000	49,951,600	48,400	48,400
19	BADAN LH	91,000,000	38,151,529	52,848,471	52,848,471
20	DISDUK CAPIL	90,000,000	89,957,089	42,911	42,911
21	BP3AKB	83,000,000	82,922,261	77,739	77,739
22	DINSOSNAKERTRANS	144,000,000	143,999,763	237	237
23	BPBD	48,000,000	48,000,000	-	-
24	DISKOPPERINDAG	92,000,000	85,932,454	6,067,546	6,067,546
25	DISPORA BUD PAR	85,000,000	30,467,350	54,532,650	54,532,650
26	KESBANG LINMAS	103,000,000	48,020,550	54,979,450	54,979,450
27	KTR.SATPOL PP	60,000,000	59,937,700	62,300	62,300
28	DPRD	415,000,000	162,092,450	252,907,550	252,907,550
29	DPPKKD	200,000,000	199,037,200	962,800	962,800
30	INSPEKTORAT	129,000,000	126,134,680	2,865,320	2,865,320
31	BKD	200,000,000	137,170,505	62,829,495	62,829,495
32	KTR PEL TERPADU	38,000,000	14,431,177	23,568,823	23,568,823
33	KETAHANAN PANGAN	117,000,000	88,489,700	28,510,300	28,510,300
34	BADAN PMD	145,000,000	144,868,725	131,275	131,275
35	KTR. PERPUSDA	48,000,000	40,738,500	7,261,500	7,261,500
36	PERTANIAN DAN HOLT	144,000,000	137,289,710	6,710,290	6,710,290
37	DIS PETERNAKAN	77,000,000	48,734,020	28,265,980	28,265,980
38	DIS KEHUTANAN	82,000,000	81,271,602	728,398	728,398
39	DIS PERIKANAN	70,000,000	67,893,658	2,106,342	2,106,342
40	SEKRETARIAT DAERAH	650,000,000	537,888,521	112,111,479	112,111,479
41	KEC.TABUNGANEN	12,000,000	12,000,000	-	-
42	KEC.TAMBAN	14,000,000	7,811,000	6,189,000	6,189,000
43	KEC.MEKARSARI	15,000,000	15,000,000	-	-
44	KEC.ANJIR PASAR	10,000,000	9,995,875	4,125	4,125
45	KEC.AJR MUARA	9,000,000	3,521,500	5,478,500	5,478,500
46	KEC.ALALAK	33,000,000	32,999,295	705	705
47	KEC.MANDASTANA	14,000,000	14,000,000	-	-
48	KEC.BELAWANG	11,000,000	11,000,000	-	-
49	KEC.WANARAYA	16,000,000	16,000,000	-	-
50	KEC.BARAMBAI	14,000,000	8,752,320	5,247,680	5,247,680
51	KEC.RANTAU BADAUH	14,000,000	9,613,391	4,386,609	4,386,609
52	KEC.CERBON	13,000,000	3,546,100	9,453,900	9,453,900
53	KEC.BAKUMPAI	17,000,000	13,933,000	3,067,000	3,067,000
54	KEC.MARABAHAN	25,000,000	24,948,380	51,620	51,620
55	KEC.TABUKAN	16,000,000	14,932,000	1,068,000	1,068,000
56	KEC.KURIPAN	15,000,000	15,000,000	-	-
57	KEC.JEJANGKIT	11,000,000	10,035,474	964,526	964,526
	JUMLAH	5,537,000,000	4,463,799,636	1,073,200,364	1,073,200,364

Marabahan, 30 Desember 2011

Kuasa BUD

DRS.H.SAMSON,M.Si

Nip.196805021990031011



DATA DANA ALOKASI KHUSUS TA 2012

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah
1	Dinas pekerjaan umum	
	a. Bina Marga (Jalan)	6,774,570,000
	b. Cipta Karya	
	- Air Minum	735,560,000
	- Sanitasi	920,400,000
	- Perum & Pemukiman	5,825,940,000
	c. Irigasi	2,782,850,000
2	Badan Lingkungan Hidup	973,340,000
3	BKBP3A	906,280,000
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,686,780,000
5	Dinas Pertanian	7,675,560,000
6	Dinas Peternakan	
7	Badan Ketahanan Pangan	
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1,135,370,000
9	Dishub	
	- saptas daerah tertinggal	2,302,760,000
	- kes transportasi darat	211,700,000
10	Dinas kes	
	- Pel Dasar	1,754,340,000
	- Pel Parmasi	1,241,140,000
11	Diknas	
	- SD	19,652,940,000
	- SMP	7,090,200,000
12	Perdagangan	-
<b>JUMLAH</b>		<b>62,669,730,000</b>

Tahap I 30% = 18.800.919.000,-

Tahap II 45% =

Tahap III 25% =





DATA DANA ALOKASI KHUSUS TA 2012

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah
1	Dinas pekerjaan umum	
	a. Bina Marga (Jalan)	6,774,570,000
	b. Cipta Karya	
	- Air Minum	735,560,000
	- Sanitasi	920,400,000
	- Perum & Pemukiman	5,825,940,000
	c. Irigasi	2,782,850,000
2	Badan Lingkungan Hidup	973,340,000
3	BKBP3A	906,280,000
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,686,780,000
5	Dinas Pertanian	7,675,560,000
6	Dinas Peternakan	
7	Badan Ketahanan Pangan	
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1,135,370,000
9	Dishub	
	- saptas daerah tertinggal	2,302,760,000
	- kes transportasi darat	211,700,000
10	Dinas kes	
	- Pel Dasar	1,754,340,000
	- Pel Parmasi	1,241,140,000
11	Diknas	
	- SD	19,652,940,000
	- SMP	7,090,200,000
12	Perdagangan	-
<b>JUMLAH</b>		<b>62,669,730,000</b>

Tahap I 30% = 18.800.919.000,-

Tahap II 45% =

Tahap III 25% =



Daftar Pemeriksa ( Evaluasi ) SPJ GU Ta. 2012

NO	Nama/ Nip	Nama SKPD
1	IMANIYAH, S.Ap	1.Set. DPRD 2.Dinas Pekerjaan umum 3.BKBP3A
2	SRI NORHIDAYATI . S.Ap	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pendidikan
3	Fathul Jannah, S.Ap	1. Kec. Jejangkit 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perhubkom dan Inpor 4. Kantor Pelayanan Terpadu 5. Badan PBD 6. Dinas Peternakan 7. Dinas Pertanian
4	A R S A N I, S.Ap	1. BPMPD 2.Perindagkop 3. Perpusda 4. BLH 5.Disporabudpar 6. Kec. Rantau Badauh 7,Kec. Tabukan 8. Kec. Belawang 9. Kec. Barambai
5	LULUK LISTIANA, SE	1. Disduk capil 2.Dinsos Nakertrans 3. Ba kesbanglinmas 4. DPPKKD 5. BAPEDA 6. Dinas perikanan
6	Wahyu Norjannah	1. RSUD H.Abd.Azis 2.Inspektorat 3. BKD 4. Dishutbun 5. Kec. Tamban 6. Kec. Mekarsari 7. Kec.Alalak 8. Kec. Mandastana 9. Kec. Wanaraya
7	Siti Amna	1. Satpol PP 2. Ketahanan Pangan 3. Anjir Pasar 4. Anjir Muara 5.Kec. Tabunganen 6. Kec Kuripan 7. Kec. Marabahan 8. Kec. Bakumpai 9. Kec. Cerbon

Marabahan, 02 Januari 2012  
Kepala Bidang Anggaran

Drs. H. Samson, M.Si  
Nip. 196805021990031011

TAMBAH UANG (TU)  
SKPD SE KABUPATEN BARITO KUALA TA. 2011

NO	SKPD	TAMBAH UANG	GU NIHIL	SALDO	SETORAN
1	Dinas Pendidikan	4,106,543,000	4,106,543,000	-	
2	Dinas Pendidikan	4,134,129,250	4,134,129,250	-	
3	Dinas Pendidikan	4,134,129,250	4,125,100,250	9,029,000	9,029,000
4	Dinas Pertanian	138,000,000	138,000,000	-	
5	Kesbangpollinmas	39,000,000	39,000,000	-	
6	Kesbangpollinmas	28,479,500	27,249,500	1,230,000	1,230,000
7	Kesbangpollinmas	18,300,000	18,300,000	-	
8	Kesbangpollinmas	20,000,000	20,000,000	-	
9	Kesbangpollinmas	44,650,000	44,650,000	-	
10	Kesbangpollinmas	18,881,000	18,881,000	-	
11	Kesbangpollinmas	30,830,000	30,830,000	-	
		12,712,942,000	12,702,683,000	10,259,000	10,259,000

Marabahan, 30 Desember 2011  
Kuasa BUD

DRS.H.SAMSON,M.Si  
Nip.196805021990031011

GANTI UANG PERSEDIAN NIHIL  
SKPD SE KABUPATEN BARITO KUALA TA. 2011

NO	SKPD	UANG PERSEDIAN	GU NIHIL	SALDO	SETORAN
1	DIKNAS/Sekretariat	404,000,000	332,932,608	71,067,392	71,067,392
2	DIKNAS/Dikmen	86,000,000	86,000,000	-	-
3	DIKNAS/PMPTK	84,000,000	62,533,000	21,467,000	21,467,000
4	DIKNAS/DIKDAS	80,000,000	72,980,500	7,019,500	7,019,500
5	DIKNAS/PNFI	92,000,000	91,406,000	594,000	594,000
6	DINAS KES/SEKRETARIAT	249,000,000	223,763,649	25,236,351	25,236,351
7	PELAYANA KESEHATAN	163,000,000	162,912,100	87,900	87,900
8	P2PL	103,000,000	102,924,000	76,000	76,000
9	PROMKES	121,000,000	61,158,700	59,841,300	59,841,300
10	RSUD ABD AZIS	190,000,000	86,188,400	103,811,600	103,811,600
11	PU/ SEKRETARIAT	50,000,000	50,000,000	-	-
12	BINA MARGA	69,000,000	69,000,000	-	-
13	CIPTA KARYA	81,000,000	81,000,000	-	-
14	PENGAIRAN	52,000,000	52,000,000	-	-
15	PU/Kebersihan	93,000,000	90,230,000	2,770,000	2,770,000
16	JASA KONSTRUKSI	30,000,000	11,067,000	18,933,000	18,933,000
17	BAPEDA	170,000,000	141,234,600	28,765,400	28,765,400
18	DISHUBKOM	50,000,000	49,951,600	48,400	48,400
19	BADAN LH	91,000,000	38,151,529	52,848,471	52,848,471
20	DISDUK CAPIL	90,000,000	89,957,089	42,911	42,911
21	BP3AKB	83,000,000	82,922,261	77,739	77,739
22	DINSOSNAKERTRANS	144,000,000	143,999,763	237	237
23	BPBD	48,000,000	48,000,000	-	-
24	DISKOPPERINDAG	92,000,000	85,932,454	6,067,546	6,067,546
25	DISPORA BUD PAR	85,000,000	30,467,350	54,532,650	54,532,650
26	KESBANG LINMAS	103,000,000	48,020,550	54,979,450	54,979,450
27	KTR.SATPOL PP	60,000,000	59,937,700	62,300	62,300
28	DPRD	415,000,000	162,092,450	252,907,550	252,907,550
29	DPPKKD	200,000,000	199,037,200	962,800	962,800
30	INSPEKTORAT	129,000,000	126,134,680	2,865,320	2,865,320
31	BKD	200,000,000	137,170,505	62,829,495	62,829,495
32	KTR PEL TERPADU	38,000,000	14,431,177	23,568,823	23,568,823
33	KETAHANAN PANGAN	117,000,000	88,489,700	28,510,300	28,510,300
34	BADAN PMD	145,000,000	144,868,725	131,275	131,275
35	KTR. PERPUSDA	48,000,000	40,738,500	7,261,500	7,261,500
36	PERTANIAN DAN HOLT	144,000,000	137,289,710	6,710,290	6,710,290
37	DIS PETERNAKAN	77,000,000	48,734,020	28,265,980	28,265,980
38	DIS KEHUTANAN	82,000,000	81,271,602	728,398	728,398
39	DIS PERIKANAN	70,000,000	67,893,658	2,106,342	2,106,342
40	SEKRETARIAT DAERAH	650,000,000	537,888,521	112,111,479	112,111,479
41	KEC.TABUNGANEN	12,000,000	12,000,000	-	-
42	KEC.TAMBAN	14,000,000	7,811,000	6,189,000	6,189,000
43	KEC.MEKARSARI	15,000,000	15,000,000	-	-
44	KEC.ANJIR PASAR	10,000,000	9,995,875	4,125	4,125
45	KEC.AJR MUARA	9,000,000	3,521,500	5,478,500	5,478,500
46	KEC.ALALAK	33,000,000	32,999,295	705	705
47	KEC.MANDASTANA	14,000,000	14,000,000	-	-
48	KEC.BELAWANG	11,000,000	11,000,000	-	-
49	KEC.WANARAYA	16,000,000	16,000,000	-	-
50	KEC.BARAMBAI	14,000,000	8,752,320	5,247,680	5,247,680
51	KEC.RANTAU BADAUH	14,000,000	9,613,391	4,386,609	4,386,609
52	KEC.CERBON	13,000,000	3,546,100	9,453,900	9,453,900
53	KEC.BAKUMPAI	17,000,000	13,933,000	3,067,000	3,067,000
54	KEC.MARABAHAN	25,000,000	24,948,380	51,620	51,620
55	KEC.TABUKAN	16,000,000	14,932,000	1,068,000	1,068,000
56	KEC.KURIPAN	15,000,000	15,000,000	-	-
57	KEC.JEJANGKIT	11,000,000	10,035,474	964,526	964,526
	JUMLAH	5,537,000,000	4,463,799,636	1,073,200,364	1,073,200,364

Marabahan, 30 Desember 2011

Kuasa BUD

DRS.H.SAMSON,M.Si

Nip.196805021990031011



## Daftar Pemeriksa ( Evaluasi ) SPJ GU Ta. 2011

NO	Nama/ Nip	Nama SKPD
1	IMANIYAH, S.Ap	1.Set. DPRD 2.Dinas Perikanan dan Kelautan 3.BKBP3A
2	SRI NORHIDAYATI . S.Ap	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pendidikan
3	Fathul Jannah, S.Ap	1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perhubkom dan Inpor 4. Kantor Pelayanan Terpadu 5. Badan PBD 6. Dinas Peternakan 7. Dinas Pertanian 8. Kec. Jejangkit
4	A R S A N I, S.Ap	1. BPMPD 2.Perindagkop 3. Perpusda 4. BLH 5.Disporabudpar 6. Kec. Rantau Badauh 7,Kec. Tabukan 8. Kec. Belawang 9. Kec. Barambai
5	LULUK LISTIANA, SE	1. Disduk capil 2.Dinsos Nakertrans 3. Ba kesbanglinmas 4. DPPKKD 5. BAPEDA
6	Wahyu Norjannah	1. RSUD H.Abd.Azis 2.Inspektorat 3. BKD 4. Dishutbun 5. Kec. Tamban 6. Kec. Mekarsari 7. Kec.Alalak 8. Kec. Mandastana 9. Kec. Wanaraya
7	Siti Amna	1. Satpol PP 2. Ketahanan Pangan 3. Anjir Pasar 4. Anjir Muara 5.Kec. Tabunganen 6. Kec Kuripan 7. Kec. Marabahan 8. Kec. Bakumpai 9. Kec. Cerbon

Marabahan, 20 Januari 2011  
Kepala Bidang Anggaran

Drs. H. Samson, M.Si  
Nip. 196805021990031011



DATA DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah
1	Dinas pekerjaan umum	
	a. Bina Marga (Jalan)	8,736,600,000
	b. Cipta Karya	
	- Air Minum	1,033,400,000
	- Sanitasi	796,800,000
	- Perum & Pemukiman	2,226,000,000
	c. Irigasi	3,437,700,000
2	Badan Lingkungan Hidup	857,900,000
3	BKBP3A	980,800,000
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	3,908,000,000
5	Dinas Pertanian	4,592,640,000
6	Dinas Peternakan	2,000,000,000
7	Badan Ketahanan Pangan	1,625,660,000
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	931,500,000
9	Dishub	
	- sapras perdesaan	1,525,400,000
	- kes transportasi darat	170,200,000
10	Dinas kes	
	- Pel Dasar	1,155,100,000
	- Pel Parmasi	942,400,000
11	Diknas	
	- SD	18,088,500,000
	- SMP	4,808,000,000
12	Perdagangan	972,200,000
<b>JUMLAH</b>		<b>58,788,800,000</b>

Tahap I 30% = 17.632.050.000,00

Tahap II 45% =

Tahap III 25% =



**BESARAN UANG PERSEDIAN TA 2011**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAN
1	KECAMATAN TABUNGANEN	12,000,000
2	KECAMATAN TAMBAN	16,000,000
3	KECAMATAN MEKARSARI	15,000,000
4	KECAMATAN ANJIR PASAR	12,000,000
5	KECAMATAN ANJIR MUARA	12,000,000
6	KECAMATAN ALALAK	37,000,000
7	KECAMATAN MANDASTANA	18,000,000
8	KECAMATAN BELAWANG	14,000,000
9	KECAMATAN WANARAYA	15,000,000
10	KECAMATAN BARAMBAI	12,000,000
11	KECAMATAN RANTAU BADAUH	17,800,000
12	KECAMATAN CERBON	15,000,000
13	KECAMATAN BAKUMPAI	17,000,000
14	KECAMATAN MARABAHAN	
15	KECAMATAN TABUKAN	13,000,000
16	KECAMATAN KURIPAN	12,000,000
17	KIECAMATAN JEJANGKIT	19,000,000
		256,800,000

RENCANA SPJ TERAKHIR BIDANG PERBENDAHARAAN DPPKID

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kegiatan (17.35) a.Lembur Evaluasi SPJ bulan Nopember PNS b.Lembur Evaluasi SPJ bulan Nopember Non PNS c.Lembur Evaluasi SPJ bulan Desember PNS d.Lembur Evaluasi SPJ bulan Desember Non PNS	Rp 4,186,000 Rp 242,000 Rp 4,186,000 Rp 242,000
2	Kegiatan (17.24) a.Pembayaran pembelian Materai	Rp 180,000
3	Kegiatan (17.15) a.Makan Minum Kegiatan bulan September b.Makan Minum Kegiatan bulan Oktober	Rp 660,000 Rp 660,000
4	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 8,376,000
5	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 8,376,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 27,108,000</b>

**GANTI UANG PERSEDIAN NIHIL  
SKPD SE KABUPATEN BARITO KUALA TA. 2010**

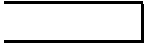
NO	SKPD	UANG PERSEDIAN	GU NIHIL	SALDO	SETORAN
1	DINAS PENDIDIKAN	1,000,000,000	990,752,501	9,247,499	9,247,499
2	DINAS KES/SEKRETARIAT	210,000,000	164,945,165	45,054,835	45,054,835
	PELAYANA KESEHATAN	150,000,000	149,693,500	306,500	306,500
	P2PL	99,000,000	43,354,000	55,646,000	55,646,000
	PROMKES	130,000,000	129,572,500	427,500	427,500
3	RSUD ABD AZIS	160,000,000	90,798,208	69,201,792	69,201,792
4	PU/ SEKRETARIAT	39,000,000	39,000,000	-	-
	BINA MARGA	60,000,000	49,304,500	10,695,500	10,695,500
	CIPTA KARYA	67,000,000	66,674,500	325,500	325,500
	PENGAIRAN	71,000,000	61,435,500	9,564,500	9,564,500
	JASA KONSTROKSI	10,000,000	9,022,500	977,500	977,500
5	BAPEDA	171,100,000	171,099,178	822	822
6	DISHUBKOM	35,000,000	34,922,200	77,800	77,800
7	BADAN LH	40,000,000	33,324,500	6,675,500	6,675,500
8	DISDUK CAPIL	50,000,000	49,818,549	181,451	181,451
9	BP3AKB	71,000,000	50,855,226	20,144,774	20,144,774
10	DINAS SOSIAL	70,000,000	44,534,336	25,465,664	25,465,664
11	DIS NAKER TRANS	60,000,000	59,995,000	5,000	5,000
12	DIN PERINDAK KOP	70,000,000	37,022,240	32,977,760	32,977,760
13	DIS TATA KOTA	50,000,000	38,445,000	11,555,000	11,555,000
14	KESBANG LINMAS	80,000,000	71,827,800	8,172,200	8,172,200
15	KTR.SATPOL PP	70,000,000	69,995,383	4,617	4,617
16	DPRD	426,000,000	323,271,422	102,728,578	102,728,578
17	DPPKD	200,000,000	165,640,778	34,359,222	34,359,222
18	INSPEKTORAT	81,000,000	26,625,000	54,375,000	54,375,000
19	BADAN KEPEGDA	220,000,000	213,926,726	6,073,274	6,073,274
20	KTR PEL TERPADU	25,000,000	17,904,752	7,095,248	7,095,248
21	KETAHANAN PANGAN	65,000,000	64,963,552	36,448	36,448
22	BADAN PMD	113,000,000	112,999,256	744	744
23	KTR. PERPUSDA	40,000,000	35,916,441	4,083,559	4,083,559
24	PERTANIAN DAN HOLT	60,000,000	50,426,500	9,573,500	9,573,500
25	DIS PETERNAKAN	65,000,000	35,871,150	29,128,850	29,128,850
26	DIS KEHUTANAN	62,000,000	61,913,613	86,387	86,387
27	DIS PERIKANAN	36,000,000	31,131,251	4,868,749	4,868,749
28	DIS PASAR	110,000,000	109,207,200	792,800	792,800
29	SEKRETARIAT DAERAH	750,000,000	547,016,680	202,983,320	202,983,320
30	KEC.TABUNGANEN	9,000,000	9,000,000	-	-
31	KEC.TAMBAN	15,000,000	15,000,000	-	-
32	KEC.MEKARSARI	9,000,000	9,000,000	-	-
33	KEC.ANJIR PASAR	8,000,000	8,000,000	-	-
34	KEC.AJR MUARA	8,000,000	8,000,000	-	-
35	KEC.ALALAK	15,000,000	15,000,000	-	-
36	KEC.MANDASTANA	13,000,000	13,000,000	-	-
37	KEC.BELAWANG	8,000,000	8,000,000	-	-
38	KEC.WANARAYA	12,000,000	12,000,000	-	-
39	KEC.BARAMBAI	12,000,000	7,463,970	4,536,030	4,536,030
40	KEC.RANTAU BADAUH	9,000,000	9,000,000	-	-
41	KEC.CERBON	10,000,000	8,019,121	1,980,879	1,980,879
42	KEC.BAKUMPAI	10,000,000	8,586,850	1,413,150	1,413,150
43	KEC.MARABAHAN	15,000,000	14,996,000	4,000	4,000
44	KEC.TABUKAN	10,000,000	9,956,529	43,471	43,471
45	KEC.KURIPAN	12,000,000	11,873,980	126,020	126,020
46	KEC.JEJANGKIT	10,000,000	10,000,000	-	-
	JUMLAH	5,201,100,000	4,430,103,057	770,996,943	770,996,943

Marabahan, 31 Desember 2010  
Kabid Perbendaharaan

T A J E L I









Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 1 Tahun 2015  
 Tanggal 5 Januari 2015

**BESARAN UANG PERSEDIAN TA.2015**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UP
1	DINAS PENDIDIKAN/SEKR	384,000,000
2	BID SMA,SMK	80,000,000
3	BID SMP	59,500,000
4	BID DIKDAS	100,000,000
5	BID PAUDNI	135,000,000
6	DINKES/SEKR	329,000,000
7	Bid Yankes	428,000,000
8	Bid P2PL	142,000,000
9	Bid.Bina Kesga	108,000,000
10	Bid Promkesling	56,000,000
11	DPU/Sekr/	100,000,000
12	Bid.Sumber daya Air	80,000,000
13	Cipta Karya	88,000,000
14	Tata Ruang/ Jaskon	50,000,000
15	Bina Marga	80,000,000
16	Bidang Perumahan	35,000,000
17	UPT Kebersihan	190,000,000
18	RSUD	150,000,000
19	BAPPEDA	155,500,000
20	DISHUBKOM DAN IMPORMATIKA	100,000,000
21	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	126,000,000
22	DISDUKCAPIL	106,000,000
23	KBBP3A	120,000,000
24	DINSOS,NAKERTRANS	190,000,000
25	DISKOP,PERINDAG	159,000,000
26	DISPORA,BUDPAR	185,000,000
27	BA KESBANGPOLINMAS	150,000,000
28	SEKR DPRD	450,000,000
29	SEKRETARIAT DAERAH	800,000,000
30	BPKAD	170,000,000
31	INSPEKTORAT	100,000,000
32	B K D	200,000,000
33	BKPP	165,000,000
34	BPMPD	300,000,000
35	DINAS PERTA TP DAN HOLTI	286,000,000
36	DINAS PETERNAKAN	119,000,000
37	DISHUTBUN	86,000,000
38	DISKAN LAUT	100,000,000
39	DISPENDA	117,500,000
40	KANTOR SATPOL PP	95,000,000
41	K P T	60,000,000
42	KANTOR PERPUSDA	70,000,000
43	BPBD	102,500,000
44	PPKD	50,000,000
	JUMLAH	7,157,000,000

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

LAPORAN ASKES DPRD TAHUN 2014 BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER TAHUN 2014		
BULAN	JUMLAH ASKES	
	2%	3%
SEPTEMBER	Rp. 1.227.240,-	Rp. 1.840.860,-
OKTOBER	Rp. 1.227.240,-	Rp. 1.840.860,-
NOPEMBER	Rp. 1.243.998,-	Rp. 1.865.997,-
DESEMBER	Rp. 1.243.368,-	Rp. 1.865.052,-

Marabahan,12 Januari 2015  
Kasi Perbendaharaan,

Sri Norhidayati,S.AP  
NIP.19670209 198903 2 004

A PERJALANAN DINAS

LAMPIRAN SPPD NOMOR ;  
TANGGAL ;

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	TRANSPORTASI		
2	UANG SAKU		
3	UANG MAKAN		
4	PENGINAPAN		
5			
6			
	JUMLAH		
TERBILANG ;			

Telah di bayar sejumlah  
Rp. 441.000,-

Marabahan, 2011  
Telah Menerima Sejumlah Uang Sebesar  
Rp. 441.000.-

Yang menerima,

SRI NORHIDAYATI, S.AP  
NIP.196702091989032004